

KONSTRUKSI OPINI PUBLIK SEKURITISASI TERORISME 9/11 PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MELALUI MEDIA MASSA

Ni Made Rimas Bela Rena¹⁾, Penny Kurnia Putri²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾
¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: rimasbelarena@yahoo.com¹⁾, penny.tjokrodihardjo@gmail.com²⁾, kawitri-
resen@gmail.com³⁾

ABSTRACT

In the wake of 9/11 attack, public opinion was essential for the securitization process of terrorism in waging war on Afghanistan and Iraq. This research aims to find out the political communication strategy carried out by the U.S. government to manipulate the news agenda to spread its propaganda. By using descriptive qualitative research method, researcher found that media and information management were being used for the sake of media agenda setting to form the expected collective opinion. The importance of maintaining credibility before an international audience became an obstacle to the U.S. government in regulating the circulation of information through mass media with international transmissions, such as CNN. As a result, its political communication strategy was only effective to affect the U.S. citizens.

Key Words: *Securitisisation of terrorism, propaganda, agenda setting, and public opinion.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu terorisme bukan merupakan suatu isu baru. Terorisme bahkan telah digunakan pada masa pendudukan kekaisaran Roma di Israel ketika abad ke-4 sebelum masehi, menyalib dua ribu orang-orang Yahudi pemberontak sebagai contoh ganjaran bagi mereka yang berkeinginan untuk pemberontak kembali. Aksi tersebut merupakan penggunaan teror pertama dalam perang yang tercatat dalam sejarah (Chaliand dan Blin, 2007:3). Seiring berkembangnya zaman, penggunaan terorisme pun mulai tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah di dunia. Seperti terorisme oleh kelompok Assassins atas dasar ideologi keagamaan di Timur Tengah pada tahun 1090-an, terorisme bangsa Mongolia terhadap penduduk di wilayah-wilayah yang akan didudukinya pada tahun 1200-an, terorisme oleh pemerintah Prancis pada tahun 1793-

1794 (yang mana mengawali pemahaman tentang istilah terorisme itu sendiri), terorisme anarkisme pada abad ke-19, hingga dimulainya pergerakan terorisme internasional dengan latar belakang nasionalisme pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang kemudian mendorong lahirnya Perang Dunia Pertama.

Namun, pasca serangan terorisme pada 11 September 2001 silam atau dikenal dengan peristiwa 9/11, isu terorisme seakan dipahami sebagai sebuah isu baru yang belum pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Berbagai media massa yang meliput berhasil membuatnya sebagai isu yang paling memantik, paling berbahaya, dan paling banyak memakan korban. Peliputan itu pun disiarkan selama berhari-hari sembari menunggu klaim untuk kejelasan kasus lebih lanjut. Terlebih, ketika Presiden George W. Bush memutuskan untuk menanganinya dengan cara yang

ekstrim, yaitu perang. Urgensi penanganan dengan tindakan yang mengejutkan itu tentu menghasilkan atmosfer yang berbeda dari kasus-kasus lainnya. Keputusan untuk melakukan sekuritisasi, ditambah peran media dalam mendramatisir keadaan mampu mengonstruksi terorisme sebagai ancaman keamanan negara yang jika tidak segera diatasi, kelangsungan hidup manusia tidak akan dapat terselamatkan.

Mengonstruksi kembali suatu isu dalam konteks sekuritisasi berarti mengupayakan justifikasi pelaksanaan tindakan luar biasa atau tindakan kontroversial yang berada diluar hukum. Pelaksanaan tindakan diluar hukum tentu cenderung mendapat pertentangan dari masyarakat karena dikhawatirkan malah akan merugikan mereka sendiri. Menyadari elit pemerintah suatu negara demokrasi tidak bisa memaksakan kehendaknya, maka memanipulasi pikiran publik akan menjadi cara yang efektif untuk dilakukan. Dari hal ini, terlihat bahwa darurat-tidaknya suatu isu untuk ditangani dengan segera tidak bergantung dari seberapa besar kerugian yang ditimbulkan, namun seberapa mampu suatu aktor mengonstruksinya sebagai sebuah ancaman darurat.

Dalam isu terorisme 9/11, konstruksi tersebut dilakukan dengan bantuan dari liputan-liputan media massa. Dengan segala liputan positif yang membenarkan dan mendukung pelaksanaan perang terhadap Afghanistan dan Irak sebagai bagian dari agenda War on Terror, media massa yang mana seharusnya dapat bersikap apolitis seakan terlihat berada dibalik kepentingan pemerintah. Media-media massa Amerika Serikat seakan terlihat turut mendorong pemahaman bahwa terorisme merupakan aksi kekerasan yang

dilakukan aktor non-negara untuk menyerang masyarakat sipil. Padahal, jika mengacu pada sejarah, terorisme pernah digunakan oleh elit yang berkuasa kepada masyarakatnya dan bahkan dilakukan sebaliknya, yaitu oleh masyarakat sipil kepada elit pemerintah atau keluarga kerajaan. Jika terorisme hanya mengacu pada aktor non-negara, tidak seharusnya Irak yang dipimpin Saddam Hussein dituduh sebagai negara yang mensponsori tindak terorisme (*state-sponsored terrorism*) membantu Al Qaeda dalam melakukan serangan pada 11 September 2001 lalu.

Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada definisi yang pasti mengenai teroris dan terorisme. Ketika keputusan berperang melawan terorisme diumumkan pada akhirnya memicu tanda tanya terkait siapa yang seharusnya diperangi. Hal itu sehubungan belum diketahuinya secara pasti pelaku dari aksi 9/11, baik tergabung ke dalam suatu organisasi atau sebaliknya, merupakan tindakan lone wolves semata. Pada dasarnya, suatu aksi dapat dikatakan sebagai aksi terorisme jika pelaku merupakan bagian dari suatu organisasi rahasia yang bertujuan untuk melakukan teror demi kepentingan politik. Sehingga, pemahaman terorisme itu sendiri sebenarnya dipertanyakan. Sebelum latar belakang pelaku diketahui, tidak semestinya istilah tersebut digunakan. Sehingga, mengumumkan akan melakukan perang terhadap terorisme akan memunculkan pertanyaan terkait aktor yang dikatakan teroris.

Secara mengejutkan klaim datang dari pemerintah yang mengatakan bahwa Al Qaeda merupakan aktor yang berada dibalik 9/11 beserta Irak yang diketahui juga membantunya. Padahal, bukti kuat yang mengarah pada keterlibatannya tidak ditemukan. Meski

demikian, pada akhirnya perang pun dapat berjalan. Berjalannya perang tersebut juga terlihat atas kontribusi media massa arus utama Amerika Serikat yang ikut mengkampanyekan dukungan kepada pemerintah yang mana kemudian mampu membentuk opini publik untuk menyetujui perang.

Di negara demokrasi, media massa merupakan suatu kunci karena dapat berperan menghancurkan atau mencegah terjadinya totalitarisme dan menjaga sistem demokrasi itu sendiri agar tetap berjalan dengan baik. Sehingga, media massa dalam suatu negara demokrasi seharusnya dapat berperan sebagai perantara yang dapat memberi edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah termanipulasi dan juga sebagai pengawas kinerja pemerintah agar bersama-sama dapat menjalankan perannya masing-masing demi kepentingan bersama. Namun, fakta bahwa media-media massa arus utama Amerika Serikat turut melakukan kampanye perang di tengah-tengah skeptisisme terkait pelaku 9/11, menunjukkan bahwa perannya dalam masyarakat tidak lagi sebagai suatu pengamat peristiwa yang apolitis, melainkan sebagai alat politik pemerintah yang membantu menggiring opini masyarakat untuk berpikir sesuai yang dikehendaki. Ketika media-media massa arus utama bahkan memiliki tendensi politik tertentu, khususnya tendensi politik yang serupa dengan pemerintah, bukan hal yang mengejutkan jika pada akhirnya mayoritas masyarakat juga akan terdorong untuk mendukung pemerintahnya, sekalipun bersifat kontroversial dalam lingkungan internasional. Sehubungan dengan kepentingan memperoleh opini publik agar sekuritisasi terorisme 9/11 dapat berjalan, penelitian ini akan meneliti strategi yang dilakukan

pemerintah Amerika Serikat dalam memanipulasi opini publik untuk menerima klaim-klaim yang dilontarkan melalui media massa arus utamanya dalam rumusan masalah, "Bagaimana pemerintah Amerika Serikat melakukan konstruksi opini publik dalam upaya sekuritisasi terorisme 9/11 melalui media massa arus utamanya dari tahun 2001 hingga 2003?".

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi permasalahan pada strategi komunikasi politik yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat demi membentuk opini publik dalam upaya sekuritisasi terorisme melalui media massa arus utamanya pasca peristiwa 9/11 dari tahun 2001 hingga 2003. Penelitian ini akan berfokus pada tiga portal berita kabel arus utama Amerika Serikat, yaitu FOX News, CNN, dan MSNBC (*Big Three*).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses sekuritisasi terorisme yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat melalui media massa pasca peristiwa 9/11 dari tahun 2001 hingga 2003 yang secara teoritis akan bermanfaat sebagai bahan pembelajaran untuk memperkaya wawasan berkaitan dengan strategi komunikasi politik demi menjalankan suatu upaya sekuritisasi. Sedangkan, manfaat praktis yang akan diperoleh adalah dapat meningkatkan pemahaman terkait upaya pembentukan opini publik internasional dengan menerapkan strategi komunikasi politik melalui media massa dengan transmisi internasional bagi para akademisi. Sedangkan bagi masyarakat

secara umum, penelitian ini akan membantu memberi pemahaman terkait upaya pemerintah dalam memengaruhi pemikiran melalui media massa ini diharapkan dapat lebih waspada terhadap kontrol informasi yang dilakukan dan berusaha mencari informasi alternatif agar terhindar dari upaya propaganda.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dari hasil temuan dalam penelitian ini, ditemukan adanya upaya sensor terhadap informasi-informasi tertentu yang bagi pemerintah Amerika Serikat dianggap membahayakan, karena diyakini memiliki maksud menghasut masyarakat dunia untuk turut melakukan serangan serupa. Padahal, bagi beberapa pihak informasi tersebut dipandang perlu untuk diketahui publik agar mengetahui motif dari serangan dan menghindari adanya propaganda. Berdasarkan hal ini, peneliti menemukan penelitian yang memiliki perhatian serupa terkait pemanfaatan media dalam membantu konstruksi pikiran masyarakat. Lance Bennett (1990) dalam penelitiannya, "*Towards a Theory of Press-State Relations in The United States*", menemukan bahwa media massa Amerika Serikat memang memiliki kecenderungan untuk bergantung pada pejabat pemerintahan sebagai dasar dari informasi yang dipublikasikannya. Berdasarkan hasil penelitiannya, ditemukan bahwa hubungan tersebut dilandasi atas hubungan transaksional atau hubungan simbiotik yang saling menguntungkan satu sama lain, yakni terfasilitasinya kebutuhan untuk mengasah kemampuan para politisi dalam pembuatan berita dan dapat memberi suplai informasi yang stabil bagi korporasi media. Bennett juga menemukan bahwa hubungan yang terjalin

antara jurnalis dengan media juga menimbulkan adanya suatu monopoli berita oleh pejabat pemerintah yang memicu adanya sensor terhadap informasi-informasi tertentu. Namun, sensor yang dilakukan diklaim sebagai suatu keputusan profesional dari media dalam menentukan informasi yang dirasa pantas untuk diterima publik. Selain itu, persetujuan untuk memberi kesempatan pejabat pemerintah untuk memonopoli berita dilihat sebagai upaya media dalam bersikap demokratis karena menyadari eksistensi pemerintah yang memang pada dasarnya merupakan perwakilan dari rakyat (Bennett, 1990: 103).

Bennett memahami bahwa posisi media yang sejalan dengan pemerintah dapat dilihat dari adanya pemberitaan yang terindeks. Indeks berita dimaksudkan sebagai suatu pedoman dalam mengemas berita, yaitu terkait topik mana yang pantas muncul ke permukaan dan topik mana yang kemudian perlu ditutup. Mengindeks berita dapat mengalihkan perhatian publik untuk berfokus pada isu yang telah ditentukan. Indeks berita di Amerika Serikat didasari atas perdebatan resmi pemerintahan yang digelar. Ketika suatu isu tidak lagi menjadi perdebatan, maka media tidak dapat membuka kembali isu tersebut untuk dibawa ke publik karena adanya dorongan pemerintah untuk membuat media berfokus pada isu lain yang menjadi topik perdebatan selanjutnya. Sehingga, upaya indeks berita tersebut mencerminkan adanya suatu monopoli media oleh pemerintah Amerika Serikat.

Pemahaman mengenai adanya upaya mengindeks berita dalam memahami hubungan yang berjalan diantara media dan pemerintah juga disadari Yusuf Yüksel (2013)

dalam penelitiannya "*An Analysis of The Media and Government Relationship*". Yüksel menemukan bahwa media cenderung menjadi pendukung kebijakan pemerintah ketika terdapat konsensus antarelit terhadap suatu isu (Yüksel, 2013:62). Selain itu, Yüksel juga menemukan bahwa hegemoni, propaganda, dan model *cascade* memengaruhi terjalannya hubungan media dengan pemerintah. Dalam pendekatan hegemoni, media dipahami memiliki kecenderungan untuk memberitakan informasi-informasi yang tidak bersifat ambigu, yakni informasi yang terlihat sebagai kebenaran atau fakta (Yüksel, 2013:63). Informasi yang dianggap kebenaran atau fakta tersebut adalah informasi yang lahir dari wacana kelompok dominan. Sehingga, kelompok-kelompok dominan tersebut memiliki akses istimewa terhadap media untuk memengaruhi pemikiran publik lewat pemberitaannya.

Sementara itu, dalam pendekatan propaganda, hubungan media dan pemerintah dipahami terjalin akibat adanya penyesuaian ideologi untuk menghindari adanya pergolakan karena menjaga keharmonisan hubungan dengan pemerintah akan menguntungkan media secara ekonomi sehubungan dengan perannya atas media sebagai penyuplai informasi mentah yang stabil. Sedangkan pendekatan model *cascade* melihat hubungan media dan pemerintah terjadi akibat adanya penyesuaian skema budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat agar dapat menciptakan hubungan yang selaras diantara pemerintah, media, dan opini publik. Jalinan hubungan itupun bagi Yüksel yang melatarbelakangi kesuksesan sekuritisasi terorisme pasca 9/11, yang mana pemerintah Amerika Serikat berupaya untuk menekankan nilai-nilai

patriotisme dan nasionalisme melalui media ke hadapan publik agar keputusan untuk menyelenggarakan perang terhadap Afghanistan dan Irak dapat terlaksana. Adanya kesesuaian nilai dan keyakinan ini kemudian membuat media bersedia untuk menjadi instrumen bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung kebijakan perang demi keamanan negara.

Berdasarkan dua penelitian di atas, dapat dipahami bahwa menjalin hubungan dengan media demi kepentingan politik adalah hal yang dapat dilakukan bagi mereka yang memiliki kekuasaan dominan dalam suatu sistem masyarakat. Kemampuan menyesuaikan nilai-nilai yang dimiliki dengan korporasi media akan memudahkan aktor untuk memanfaatkan media sebagai alat politik yang dapat mendorong publik untuk mendukung kebijakan pemerintah. Berkenaan dengan peristiwa 9/11, penelitian ini akan meneliti lebih jauh terkait bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dalam menjalin hubungan tersebut demi kepentingan sekuritisasi terorisme agar dapat mendorong publik menyetujui keputusan menjalankan perang terhadap Afghanistan dan Irak.

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang akan memaparkan detail proses sekuritisasi terorisme melalui media berita kabel arus utama Amerika Serikat pasca 9/11.

3.2 Sumber Data

Sebagian besar sumber data yang digunakan penelitian ini berasal dari artikel-artikel yang diunduh dari internet. Peneliti juga menggunakan tesis, berita dan buku yang tersedia secara online dalam melengkapi dan mendukung argumen dalam penelitian ini.

3.3 Level Analisis

Penelitian ini menggunakan level analisis negara, yaitu Amerika Serikat. Peneliti menganalisis keputusan Amerika Serikat dalam melakukan sekuritisasi terorisme dengan memanfaatkan media-media berita kabel arus utama milik Amerika Serikat dalam mengkonstruksi pemahaman publik terkait isu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, tesis, berita daring, dan sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan melalui kegiatan penyuntingan, pengkodean, analisis, dan interpretasi.

3.6 Teknik Penyajian Data

Penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi. Teknik penyajian data yang dilakukan adalah penyajian data tematik yang mana pembahasan akan dipaparkan dalam beberapa tema.

4. KONSTRUKSI OPINI PUBLIK SEKURITISASI TERORISME 9/11 PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MELALUI MEDIA MASSA

4.1 Sentimen Perang Afghanistan dan Irak

Dalam pidato yang disampaikan pada 20 September 2001, Bush menyatakan akan memulai agenda perang melawan terorisme dengan melakukan penyerangan terhadap Al Qaeda yang mana dikatakan berada dibalik serangan 9/11. Pada 25 September 2001, Donald Rumsfeld, Menteri Pertahanan Amerika Serikat telah menyepakati bahwa penyerangan terhadap Taliban di Afghanistan yang diklaim menyembunyikan keberadaan Osama bin Laden akan dilaksanakan pada 7 Oktober 2001 (History, 1/2/2019). Sentimen anti-Muslim atau Islamofobia dan xenofobia menjadi semakin menguat, khususnya dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat (History, 1/2/2019). Terlebih, dalam pidato pada 16 September 2001 Bush bahkan pernah menyebut kampanye perangnya sebagai suatu perang salib yang menunjukkan adanya niatan untuk membuat perang sebagai pertikaian antara umat Kristiani dengan Muslim, mengingat Osama bin Laden juga berupaya menarik simpati dan dukungan masyarakat Muslim dunia untuk ikut membenci Amerika Serikat.

Upaya konstruksi opini untuk dapat melihat perang Afghanistan bukan sebagai perang melawan Islam dan Muslim menjadi sulit untuk dilakukan ketika Al Jazeera, portal berita negeri Qatar, menampilkan sisi lain dari pelaksanaan perang yang mencoreng nama baik Amerika Serikat di mata dunia, seperti tayangan korban-korban sipil yang berjatu-

han, kehancuran yang ditimbulkan, serta kemiskinan masyarakat Afghanistan. Hal itu pun meyakinkan masyarakat Muslim bahwa keputusan berperang yang dikampanyekan pemerintahan Bush sebagai cara menjamin perdamaian dari ancaman terorisme tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan, malah akan menambah permasalahan baru. Ditambah lagi, muncul kabar bahwa Richard Clarke, penasihat khusus presiden, Bush sempat memberi desakan untuk menemukan keterkaitan antara Saddam Hussein dengan aksi 9/11 tersebut meski telah berulang kali meyakinkan bahwa keterkaitan tersebut tidak pernah ada (Ratnesar, 25/3/2004). Kasus surat antraks yang kemudian muncul dijadikan kesempatan untuk menjustifikasi penyerangan terhadap Saddam Hussein. Investigator Amerika Serikat mengklaim bahwa Irak memiliki teknologi dengan kapabilitas yang cukup untuk dapat mengubah bakteri antraks menjadi senjata mematikan dalam bentuk bubuk (Rose dan Vulliamy, 14/10/2001). Atas dasar tersebut, muncul tuduhan kepemilikan senjata nuklir yang kemudian membuat Irak menerima klaim sebagai ancaman bagi perdamaian dunia.

4.2 Strategi Komunikasi Pelaksanaan Perang

4.2.1 Manajemen Informasi dalam Perang Afghanistan

Kekhawatiran terhadap tayangan wawancara Osama bin Laden bersama Al Jazeera pada 7 Oktober 2001 yang mengajak umat Muslim di dunia untuk melakukan hal serupa terhadap Amerika Serikat dan ali-

ansinya menjadi alasan pemerintah Amerika Serikat mendorong media-media berita arus utama seperti CNN, NBC, FOX News, CBS, dan ABC untuk tidak menyiarkan kembali siaran rekaman itu tanpa melalui proses penyuntingan terlebih dahulu dalam panggilan konferensi yang diselenggarakan Condoleezza Rice pada 10 Oktober 2001. Kelima portal berita tersebut telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan sensor. FOX News dan MSNBC, yang mana merupakan bagian dari jaringan berita NBC yang secara khusus meliput isu-isu politik, memutuskan untuk tidak menayangkannya sama sekali. Sedangkan, portal berita lainnya hanya menampilkan sebagian dari rekaman atau sebatas melakukan parafrase (Hart dan Ackerman, 2/3/2002).

Eksistensi Al Jazeera semakin disadari menjadi ancaman bagi citra pemerintah Amerika Serikat ketika pada saat perang di Afghanistan berlangsung tayangan-tayangan yang dihadirkan lebih banyak menyoroti korban-korban sipil yang ditimbulkan. Al Jazeera pada dasarnya merupakan satu-satunya portal berita yang mendapat akses untuk meliput pemberitaan secara langsung di Afghanistan oleh Taliban. Sehingga, ketika pemberitaan yang dihadirkan merupakan pemberitaan dari sisi kemanusiaan, seperti liputan korban sipil, media lain yang menjalin hubungan kerjasama pertukaran konten berita dengannya, yaitu CNN dan ABC akan turut memasukkan liputan tersebut pada agenda pemberitaan.

Selama pelaksanaan perang disadari korban-korban sipil yang ditimbulkan akan menjadi kontroversi di kalangan masyarakat internasional, khususnya bagi kalangan masyarakat Arab. Seperti pada peristiwa

pembunuhan massal yang terjadi di Kandahar di masa perang Afghanistan berlangsung pada 23 Oktober 2001. Berdasarkan penuturan Pentagon pada ABC, serangan tersebut merupakan serangan tidak disengaja yang mana pada akhirnya mengakibatkan 122 warga sipil tewas. Menganggapi hal itu, media-media Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan sensor mandiri dengan hanya menampilkan korban-korban dengan kondisi yang tidak begitu parah. Sedangkan, dalam liputan asli Al Jazeera korban-korban yang ditayangkan mulai dari anak-anak kecil dengan luka yang sangat parah hingga orang-orang yang berusaha menggali makam untuk mayat-mayat yang ada (Azran, 2010:49).

Di masa perang meliputi pemberitaan yang dapat menantang kredibilitas militer Amerika Serikat bagi pers seakan sebagai suatu hal yang tabu (Zelizer, 2002:55). Rumsfeld berulang kali menekankan pada pidato-pidatonya bahwa kebenaran merupakan sesuatu yang berharga sehingga perlu untuk dijaga dengan baik. Berupaya mengungkap informasi rahasia tidak hanya berbahaya bagi negara, namun juga bertentangan dengan hukum (Bumiller, 7/10/2001). Atas hal tersebut, selama perang berlangsung di Afghanistan, portal-portal media massa Amerika Serikat sepakat untuk menyensor liputan-liputan yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap masyarakat sipil (Azran, 2010:44).

Meski demikian, upaya manajemen informasi yang dilakukan tersebut hanya berlaku pada media massa Amerika Serikat karena CNN sebagai portal berita dengan transmisi internasional tidak dapat turut sepenuhnya pada manipulasi pemerintah. Pada dasarnya, target utama dari upaya propaganda

epemrintah Amerika Serikat adalah masyarakat Arab, karena menyadari efek pasca perang yang ditimbulkannya akan menumbuhkan kebencian masyarakat Muslim dunia. Demi menjaga kredibilitasnya di mata dunia, CNN merasa perlu menghadirkan pemberitaan secara objektif. Maka, meski dorongan-dorongan dan kritik yang dilayangkan kepadanya, CNN tidak dapat menyebarkan propaganda pemerintah ke hadapan audiens internasional, terutama kepada masyarakat Arab. Pada akhirnya, CNN pun memutuskan untuk melakukan sensor hanya dalam siaran lokal terhadap masyarakat Amerika Serikat semata dan membiarkan siaran-siaran kemanusiaan yang berpotensi mencoreng citra pemerintah Amerika Serikat untuk tetap disiarkan ke hadapan audiens internasionalnya (Azran, 2010:64).

4.2.2 Manajemen Media dalam Rencana Pelaksanaan Perang Irak

Dengan bantuan jasa humas Rendon Group yang dikontrak sebesar \$397.000 oleh Pentagon, informasi yang berkenaan dengan rencana perang selanjutnya pun disusun (Silverstein, 7/10/2001). Pemerintahan Bush berupaya melakukan propaganda yang dapat membuat Saddam Hussein memiliki keterkaitan dengan peristiwa 9/11. Humas dapat berperan dalam mengatur kehadiran ke hadapan media sehingga dapat menjadi fokus pemberitaan yang akan mengonstruksi pemikiran audiens untuk meyakini keterlibatan tersebut.

Rendon Group merupakan firma humas rahasia yang berbasis di Washington. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat pernah menggunakan jasanya pasca Perang Teluk untuk menggulingkan jabatan Saddam Hus-

sein di Irak. CIA bahkan dikabarkan mengeluarkan dana hingga \$23 juta untuk melancarkan kampanye yang dapat memperburuk citra Saddam Hussein di mata dunia sekaligus membangun dukungan internasional untuk memberi sanksi ekonomi kepada Irak. Rendon Group dikenal sebagai firma humas dengan banyak catatan keberhasilan yang diraih dalam mempopulerkan isu untuk menjadi fokus pemberitaan di media-media massa dunia. Bahkan diketahui memiliki pengalaman bekerjasama dengan berbagai perusahaan di lebih dari 80 negara. Profesionalitas yang dimiliki telah terbukti mampu mengantarkan kesuksesan ekonomi kepada para kliennya. Atas prestasinya tersebut, John Rendon selaku pendiri Rendon Group pun mulai dikenal sebagai pria paling berpengaruh di dunia (Silverstein, 7/10/2001). Hal itulah yang membuat pemerintah Amerika Serikat kembali memercayakan Rendon Group untuk menyusun strategi komunikasi.

Dalam melakukan manajemen medianya, Rendon Group merangkai profil kelompok oposisi Irak agar terkesan lebih dapat dipercaya di hadapan komunitas internasional. Kelompok tersebut kemudian dinamai *Iraqi National Congress* (INC). Posisi INC ini diharapkan akan berguna dalam menantang kekuasaan Saddam Hussein di Irak. Selain itu, pada Februari 2002 Rendon Group juga mengatur suatu ruang informasi 24 jam, "*Information War Room*", dengan tujuan dapat memonitor arus informasi global dan secara langsung akan memberikan bantahan terkait informasi yang menyimpang. *White House Iraq Information Group* (WHIG) merupakan bagian dari proyeknya yang dibentuk pada Agustus 2002, yaitu suatu kelompok informasi yang setiap minggu akan membahas

mengenai siapa saja yang akan berpartisipasi dalam penyebaran propaganda perang Irak (Bloch, Fitzgerald, dan Todd, 2008: 43).

Pada 6 September 2002 pemerintahan Bush mengadakan konferensi pers bersama yang juga dihadiri perdana menteri Inggris, Tony Blair. Konferensi pers tersebut membicarakan bukti baru terkait kepemilikan senjata pemusnah massal Irak untuk disebar kepada media, selain dugaan hubungannya dengan kasus antraks. Bukti yang dimaksud merupakan adanya informasi bahwa Irak berusaha memperoleh tabung komposit aluminium dalam pembangunan pabrik gas sentrifugal yang diperkirakan memiliki peranan nuklir didalamnya. Diketahui Irak sempat melakukan pembelian 3000 tabung presisi dari China pada tahun 2000 yang diduga digunakan untuk keperluan aktifitas konstruksi yang tengah berjalan di Irak. Dicurigai aktifitas konstruksi tersebut merupakan aktifitas pembangunan pabrik nuklir. Transaksi berhasil terlacak oleh WINPAC (*Weapons Intelligence and Arms Control Center*) di bawah naungan CIA yang mana sempat dihentikan di perbatasan Yordania pada Juli 2001. Informasi itulah yang kemudian berusaha dipromosikan pemerintahan Bush kepada media-media nasional dan internasional (Bloch, Fitzgerald, dan Todd, 2008: 43).

WHIG bertanggung jawab dalam menyusun dan mengatur strategi penyebaran informasi tersebut yang mana pada 7 hingga 8 September 2002 berperan mengatur kehadiran pejabat-pejabat pemerintahan di media. Disisi lain, Donald Rumsfeld terlibat dalam perekrutan 75 orang pensiunan perwira militer untuk turut memberikan poin-poin pembicaraan terkait hal serupa ke hadapan FOX News, CNN, dan MSNBC. Selain itu,

WHIG juga memegang peranan dalam menyusun naskah pidato yang akan disampaikan para pejabat pemerintah. Kebanyakan dari isi naskah tidak didasarkan pada sumber, namun tetap berhasil masuk ke dalam agenda pemberitaan media-media (Guma, 20/1/2020).

Pada 8 September 2002, Powell tampil pada acara talkshow yang diadakan FOX News guna menyampaikan bahwa Saddam terus berkeinginan memperoleh teknologi yang akan digunakan dalam pengembangan senjata nuklir, yang mana pada informasi perolehan tabung komposit aluminium tersebut telah menunjukkan kapabilitasnya dalam mendapatkan senjata nuklir. Di hari yang sama, Condoleezza Rice juga tampil dalam program berita CNN untuk menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang penting untuk dipublikasikan agar serangan nuklir dapat dicegah (Bloch, Fitzgerald, dan Todd, 2008: 43). Bertepatan dengan itu, hal yang sama pun disampaikan Cheney saat hadir dalam tayangan wawancara MSNBC, *Meet the Press* (Graham Jr., 2012:122).

Dalam pidato yang dilakukan pada 7 Oktober 2002 di Cincinnati, Ohio, Bush memberi pernyataan serupa terkait keinginan Irak dalam memperoleh tabung aluminium berkekuatan tinggi yang digunakan untuk memperkaya uranium dalam pengembangan senjata nuklir. Pada 28 Januari 2003, dalam pidato State of the Union, Bush memberi keyakinan kepada publik bahwa informasi yang didapat bukan sekadar dugaan semata karena tiga orang pembelot Irak dikatakan telah memberi tahu adanya kepemilikan beberapa laboratorium senjata nuklir (Graham Jr., 2012:122).

Pembelot-pembelot tersebut disiapkan oleh firma humas kedua yang diketahui dikon-

trak Pentagon, Benador Associate. Melalui INC untuk memberikan kesaksian terkait situs-situs senjata yang dimiliki Saddam Hussein ke hadapan media. Khidir Hamza, seorang mantan teknisi nuklir Irak dihadirkan oleh CNN pada 31 Juli 2002. Bersama dengan mantan inspektur senjata PBB, Richard Butler, Hamza menuturkan bahwa Irak memiliki lebih dari sepuluh ton uranium dan satu ton uranium yang telah diperkaya. Uranium-uranium tersebut akan mampu membuat Irak memiliki tiga senjata nuklir dalam waktu tiga tahun (CNN, 1/8/2002).

Pada 11 Desember 2002 salah satu pembelot Irak, Mohammed Tuma, seorang mantan Pengawal Partai Republik Saddam, dihadirkan dalam tayangan FOX News. Dalam kehadirannya, ia memberi kesaksian sejarah penggunaan senjata kimia terutama terhadap orang-orang Kurdi pada tahun 1988. Kesaksiannya tersebut pun dijadikan alasan baginya untuk mendukung kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam menyelenggarakan perang terhadap Irak (FOX, 13/12/2002). Sementara itu, Hussein Kamel, pejabat tinggi Irak yang membelot pada Saddam Hussein memberi pengakuan dalam acara Newsweek yang ditayangkan MSNBC pada 3 Maret 2003 bahwa pasca Perang Teluk Irak telah menghancurkan seluruh stok senjata kimia dan biologisnya, namun masih mempertahankan desain dan detail tekniknya. Hal itu pun membantu menguatkan keyakinan bahwa Irak masih memiliki kapabilitas dalam memperoleh dan menggunakan senjata pemusnah massal (Barry, 3/3/2003).

Dalam pidato State of the Union -nya tersebut, Bush juga memperkenalkan dokumen, "*Apparatus of lies: Saddam's disinformation and propaganda 1990-2003*" yang disusun

OGC atau *Office of Global Communication* yang dibentuk pada 22 Agustus 2002 untuk mengatur strategi komunikasi luar negeri, dengan tujuan dapat menghalau kesalahpahaman terhadap Amerika Serikat, koalisi-koalisinya, dan niatan Barat terhadap Irak. Dokumen tersebut disusun untuk ditujukan kepada pemerintah di berbagai negara, media-media massa, dan masyarakat global agar mempertimbangkan kembali penilaiannya terhadap rezim Saddam Hussein, sikap, dan citranya dalam catatan kebohongan-kebohongan yang dimiliki (Botes, 2007:69).

Upaya dalam manajemen media ini pun berhasil membuat konten berita pemerintah Amerika Serikat dapat mendominasi wacana lain. Berdasarkan studi yang dilakukan badan pengawas liputan media, FAIR (*Fairness and Accuracy in Reporting*), di awal tahun 2003 sebanyak 64% liputan yang disiarkan di Amerika Serikat oleh lima portal berita kabel arus utama, ABC, CBS, CNN, FOX, NBC dan PBS, didasarkan pada sumber-sumber yang mendukung pelaksanaan perang. Sedangkan, 71% bintang-bintang tamu yang dihadirkan merupakan tokoh-tokoh yang juga mendukung perang (DiMaggio, 2015:83). Akan tetapi, keberhasilan membuat informasi yang disajikan pemerintah menjadi tema pemberitaan di media massa tidak serta merta disebabkan karena keberhasilan menarik perhatian editor untuk menerimanya, tetapi juga didorong atas upaya manajemen informasi yang dilakukan. Seperti dorongan sensor, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, hal itu tidak dapat berlaku bagi CNN dengan siaran internasionalnya. CNN internasional berkomitmen untuk menampilkan pemberitaan dari segala sisi untuk men-

jamin informasi yang disampaikan bebas dari bias politik. Di masa perang, utamanya pada masa perang Afghanistan dan Irak, CNN internasional tidak mendasari liputannya dengan nuansa patriotik seperti yang dilakukan CNN demi menjaga kredibilitas di mata dunia (Maddox, 4/4/2003). Sehingga dapat dikatakan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat melalui media massanya memang efektif dilakukan, namun semata-mata untuk membentuk opini masyarakat Amerika Serikat dan kurang efektif dilakukan untuk mengatur peredaran informasi kepada masyarakat asing melalui CNN sebagai satu-satunya portal berita dengan transmisi internasional kala itu karena kepentingan untuk menampilkan diri sebagai media berita terpercaya.

5. KESIMPULAN

Pasca serangan 9/11, pemerintah Amerika Serikat berupaya memperoleh opini publik melalui strategi komunikasi politik yang disusunnya dengan memanfaatkan media arus utamanya, yaitu FOX, CNN, dan MSNBC, untuk memanipulasi pemikiran audiens internasional. Manipulasi agenda berita tersebut dilakukan dengan melakukan upaya manajemen informasi dan manajemen media yang dibantu humas Rendon Group dan Benador Associate. Manajemen informasi dilakukan dengan dorongan sensor terhadap informasi tertentu untuk membatasi informasi alternatif yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan, manajemen media dilakukan dengan membentuk badan-badan informasi khusus untuk memberi suplai informasi kepada media massa agar dapat berkontribusi dalam mengatur tema pemberitaan.

Namun, dorongan untuk tetap bersikap netral demi menjaga kredibilitas di mata dunia membuat CNN dengan transmisi internasionalnya tidak mampu menuruti keinginan pemerintah Amerika Serikat tersebut. Akibatnya, strategi komunikasi tersebut hanya efektif menargetkan masyarakatnya semata.

6. DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Aglionby, J., Sellars, B. & Steele, J. (13 Oktober 2001). "*Anti-US protests worldwide*". The Guardian. Diakses pada 19 April 2020, dari <https://www.theguardian.com/world/2001/oct/13/afghanistan.terrorism19>.

Barry, J. (3 Maret 2003). "*The Defector's Secret*". MSNBC. Diakses pada 25 Maret 2020, dari <http://www.msnbc.com/news/876128.asp?cp1=1>.

Britannica. (2 Maret 2020). "Osama bin Laden". Diakses pada 22 Februari 2020, dari <https://www.britannica.com/biography/Osama-bin-Laden>.

Brooks, J. (28 Juni 2016). "*What is Propaganda? Noam Chomsky on Media, Manipulation, and Democracy*". Diakses pada 26 Maret 2020, dari <https://highexistence.com/wonder-terror-propaganda-modern-governments-misuse-media-manipulate-bewildered-herd/>.

Bumiller, E. (7 Oktober 2001). "*New Slogan in Washington: Watch What You Say*". Diakses pada 20 Maret 2020, dari <https://www.globalissues.org/article/269/new-slogan-in-washington-watch-what-you-say>.

Calhoun, J. (20 Maret 2003). "*There Are Limits Even to Free Speech*". Portland Tribune. Diakses pada 1 Mei 2020 pada

<https://pamplinmedia.com/pt/10-opinion/118792-there-are-limits-even-to-free-speech>.

Chang, A. (11 September 2017). "*Americans' Sustained Fear From 9/11 Has Turned Into Something More Dangerous*". Vox. Diakses pada 3 Mei 2020 pada <https://www.vox.com/2016/9/9/12852226/fear-witches-terrorists>.

Chishti, M. & Bergeron, C. (8 September 2011). "*Post-9/11 Policies Dramatically Alter the U.S. Immigration Landscape*". Diakses pada 19 April 2020, dari <https://www.migrationpolicy.org/article/post-911-policies-dramatically-alter-us-immigration-landscape>.

CNN. (1 Agustus 2002). "*Defector: Iraq could have nukes by 2005*". CNN. Diakses pada 20 Maret 2020, dari <https://edition.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/07/31/senate.iraq.hearing/>.

CNN. (13 November 2019). "*September 11 Terror Attack Fast Facts*". Diakses pada 8 Februari 2020, dari <https://edition.cnn.com/2013/07/27/us/september-11-anniversary-fast-facts/index.html>.

Cockburn, P. (9 Mei 1993). "*Saddam Sent Hit Team to Kill Bush in Kuwait*". Independent. Diakses pada 22 Februari 2020, dari <https://www.independent.co.uk/news/saddam-sent-hit-team-to-kill-bush-in-kuwait-2321888.html>.

Equal Employment Opportunity Commission. (11 September 2019). "*Effects of the 9/11 Terrorist Attacks on the EEOC*". Diakses pada 23 April 2020, dari <https://www.eeoc.gov/eeoc/history/50th/milestones/9-11.cfm>.

Fernandez, N. & Lewis, B. (3 Maret 2018). "*The Iraq War Cheerleaders Who Are Still Around 15 Years Later*". Diakses pada 2 Mei 2020, dari <https://www.mediamatters.org/sea>

n-hannity/iraq-war-cheerleaders-who-are-still-around-15-years-later.

FOX. (13 Desember 2002). "*An Iraqi Defector Speaks Out*". FOX News. Diakses pada 25 Maret 2020, dari <https://www.foxnews.com/story/an-iraqi-defector-or-speaks-out>.

Guma, G. (20 Januari 2020). "*How Perception Management Has Wrecked Reality*". Diakses pada 1 April 2020, dari <https://www.globalresearch.ca/how-perception-management-has-wrecked-reality/5701091>.

Hart, P. & Ackerman, S. (2 Maret 2002). "*Patriotism & Censorship*". Diakses pada 20 Maret 2020, dari <https://www.globalissues.org/article/325/patriotism-and-censorship>.

Herman, E. dan Chomsky, N (1988). "*A Propaganda Model*". Diakses pada 16 Desember 2019, dari <https://chomsky.info/consent01/>.

HESSON, T. (13 September 2012). "*Five Ways Immigration System Changed After 9/11*". ABC. Diakses pada 23 April 2020, dari https://abcnews.go.com/ABC_Univision/News/ways-immigration-system-changed-911/story?id=17231590.

History (1 Januari 2019). "*A Timeline of the U.S.-Led War on Terror*". Diakses pada 23 April 2020, dari <https://www.history.com/topics/21st-century/war-on-terror-timeline>.

Lichtblau, E. (17 September 2016). "*Hate Crimes Against American Muslim Most Since Post-9/11 Era*". New York Times. Diakses pada 23 April 2020, dari <https://www.nytimes.com/2016/09/18/us/politics/hate-crimes-american-muslims-rise.html>.

Loudis, J. (20 Juni 2017). "*What Did Al Jazeera Do?*". New Republic. Diakses pada 20 April 2020, dari <https://newrepublic.com/article/143410/al-jazeera-do>.

Maddox, T. (4 April 2003). "*CNN and the war: Your questions*". CNN. Diakses pada 17 April 2020, dari <https://edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/04/02/sprj.irq.cnn.qa/index.html>.

Pew Research Center. (22 Agustus 2006). "*Al Jazeera Timeline*". Diakses pada 21 April 2020, dari <https://www.journalism.org/2006/08/22/al-jazeera-timeline/>.

Ratnesar, R. (25 Maret 2004). "*Richard Clarke, at War With Himself*". Time. Diakses pada 3 April 2020, dari <http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,604598,00.html>.

Roberts, J. (4 September 2002). "*Plans For Iraq Attack Began On 9/11*". CBS. Diakses pada 21 April 2020, dari <https://www.cbsnews.com/news/plans-for-iraq-attack-began-on-9-11/>.

Rose, D. & Vulliamy, E. (14 Oktober 2001). "*Iraq 'behind US anthrax outbreaks'*". The Guardian. Diakses pada 13 April 2020, dari <https://www.theguardian.com/world/2001/oct/14/terrorism.afghanistan6>.

Ser, K.K.K., (12 September 2016). "*Data: Hate crimes against Muslims increased after 9/11*". Diakses pada 23 April 2020, dari <https://www.pri.org/stories/2016-09-12/data-hate-crimes-against-muslims-increased-after-911>.

Silverstein, K. (7 November 2001). "*Selling the War*". Diakses pada 1 April 2020, dari <https://www.thenation.com/article/archive/selling-afghan-war/>.

Smith, B.L. (20 Maret 2020). "*Propaganda*". Britannica. Diakses pada 1 April 2020, dari <https://www.britannica.com/topic/propaganda>.

Snow, N. (Oktober 2006). "*The Revival of the Propaganda State US Propaganda at Home and Abroad Since 9/11*". Diakses pada

22 Februari 2020, dari https://www.researchgate.net/publication/245518018_The_Revival_of_The_Propaganda_State_US_Propaganda_at_Home_and_Abroad_since_911.

Stein, J. & Dickinson, T. (20 Desember 2011). "Lie by Lie: A Timeline of How We Got Into Iraq". Mother Jones. Diakses pada 19 April 2020, dari <https://www.motherjones.com/politics/2011/12/leadup-iraq-war-timeline/>.

The Guardian (21 September 2001). "Text of George Bush's Speech". Diakses pada 2 Mei 2020 dari <https://www.theguardian.com/world/2001/sep/21/september11.usa13>.

Buku

Chaliand, G. dan Blin, A. (2007). "The History of Terrorism: From Antiquity to Al Qaeda". Berkeley, Los Angeles, dan London: University of California Press.

DiMaggio, A. R., (2016). "Selling War, Selling Hope: Presidential Rhetoric, the News Media, and U.S. Foreign Policy Since 9/11". New York: State University of New York Press.

Fitzgerald, P., Todd, P., & Bloch, J. (2008). "Spies, Lies and the War on Terror". London: Zed Books.

Graham Jr., T., (2012). "Unending Crisis: National Security Policy after 9/11". Washington: University of Washington Press.

Hoffman, B. (2006). "Inside Terrorism". New York: Columbia University Press.

Jaramillo, D. L. (2009). "Ugly War, Pretty Package: How CNN and Fox News Made the Invasion of Iraq High Concept". Indiana: Indiana University Press.

Ludin, R. dan Loopesko, W. (2016). "...and the Sun Will Rise from the West: The

Predicament of "Islamic Terrorism" and the Way Out". Bloomington: Zlibris US.

McNair, B. (2011). "An Introduction to Political Communication". London: Routledge.

Samuel-Azran, T. (2010). "Al Jazeera and US War Coverage". New York: Peter Lang Publishing, Inc.

Silalahi, U. (2012). "Metode Penelitian Sosial". Bandung: PT Refika Aditama.

Zelizer, B. (2002). "Journalism After September 11". London: Routledge.

Jurnal

Bennett, W. L. (1990). "Toward a Theory of Press-State Relations in The US". *Journal of Communication*. 40(2). pp. 103-127. Diakses dari <https://web.stanford.edu/class/comm1a/readings/bennett-press-state.pdf>.

Byman, D. (2003). "Constructing a Democratic Iraq: Challenges and Opportunities". *International Security*, 28(1), H. 47-78. Diakses dari https://www.jstor.org/stable/4137575?read-now=1#page_scan_tab_contents.

Dolinec, V. (2010). "The Role of Mass Media in The Securitization Process of International Terrorism". *Politické vedy*. 13(2). pp. 8-32. Diakses dari <http://www.politickévedy.fpvmv.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=18586>.

Jamieson, K. H. (2007). "Justifying the War in Iraq: What the Bush Administration's Uses of Evidence Reveal". *Rhetoric & Public Affairs*, 10 (2), pp. 249-273. Diakses dari <https://doi.org/10.1353/rap.2007.0038>.

Kellner, D. (2004). "9/11 Spectacles of Terror, and Media Manipulation". *Critical Discourse Studies*, 1(1), pp. 41-64. Diakses dari <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17405900410001674515?needAccess=true>.

Mccombs, M. (2011). *"The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public Opinion"*. University of Texas, pp. 1-21. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/237394610_The_Agenda-Setting_Role_of_the_Mass_Media_in_the_Shaping_of_Public_Opinion.

Montgomery, M. (2005). *"The discourse of war after 9/11"*. *Language and Literature*. 14(2). pp. 149-180. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/258163628_The_discourse_of_war_after_911.

Nevers, D. R. (2007). *"Sovereignty and Ethical Argument in the Struggle against State Sponsors of Terrorism"*. *Journal of Military Ethics*, 6(1), pp. 1-18. Diakses dari <https://www.law.upenn.edu/live/files/1521-reen-ee-de-nevers>.

Romarheim, A. G. (2015). *"War At Home: Strategic Narratives of the War on Terrorism"*. King's College London. Diakses dari <https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/374352/War>.

Wanta, W. & Alkazemi, M. (2017). *"Agenda-Setting: History and Research Tradition"*. *The International Encyclopedia of Media Effects*, pp. 1-14. Diakses dari doi:10.1002/9781118783764.wbieme0030.

Yüksel, Y. (2013). *"An Analysis of the Media and Government Relationship"*. *Selçuk İletişim*, 8(1), pp. 57-70. Diakses dari <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/177735>

Tesis

Botes, M. (2007). *"THE PUBLIC DIPLOMACY OF THE UNITED STATES OF AMERICA IN THE "WAR ON TERROR"*". (Tesis University of Pretoria, 2007). Diakses pada 23 April 2020, dari <http://citeseerx.ist.psu.edu/>

[viewdoc/download?doi=10.1.1.874.4251&rep=rep1&type=pdf](http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.874.4251&rep=rep1&type=pdf).

Cherkaoui, T. (2010). *"Orientalism, Pan-Arabism, and Military-Media Warfare: A Comparison Between CNN and Al Jazeera Coverage of The Iraq War"*. (Disertasi Auckland University of Technology). Diakses pada 9 Mei 2020, dari <https://core.ac.uk/download/pdf/56361781.pdf>.